

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

Munefer Adin¹, Daud Hasim², Said mala³

¹Lulusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Khairun

Email: Muneferadin@gmail.com

^{2,3} Dosen Ekonomi Pembangunan FEB-Unkhair

Daudhasim@unkhair.ac.id ; saidmala@unkhair.ac.id

Abstract: Study aims to determine the level of welfare of the population between sub- districts in the City of Ternate City which is reflected in the PDRB per capita of the sub- district, and determine the level of development inequality between sub-districts in Ternate City. This study uses descriptive analysis methods and Williamson index derivatives to calculate sub-district PDRB and the level of inequality between sub-districts in Ternate City.

The welfare level of the city of Ternate as reflected in per capita income during the period 2015 to 2017, and decreased in 2018-2019. The sub-district with the highest per capita income level is Batang Dua district, and the lowest is Ternate Island. The degree of development inequality between sub-districts in Ternate City using the Williamson Index approach decreased in 2015 – 2018, and increased in 2019. Although development inequality between regions in Ternate City in 2019 has increased, it is classified in the low category. Although inequality continues to increase, the inequality that occurs is still relatively low because the average inequality that occurs is 0.024504 which is still below 0.5.

Keywords: income per capita, inequality.

Kode JEL : H24

I. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2007). Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di perlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi juga untuk mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan setiap daerah yang sudah maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, disparitas pendapatan antar penduduk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah dan IPM.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Namun demikian tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Sebab pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensi yang berbeda (Perroux dikutip dalam Arsyad, 1999:147). Dalam intensi pertumbuhan yang berbeda, pelaksanaan pembangunan sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain (Dumairy, 1996:55-56). Dari hal tersebutlah, pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya ketimpangan. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan kondisi dan potensi pada masing-masing daerah, di mana rata-rata masyarakatnya bekerja pada sektor agraris dan berpendidikan rendah.

Adanya otonomi daerah sebagai sistem kerja pemerintah Indonesia, diharapkan kebijakan ini juga dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (daerah di sini terutama kabupaten dan kota), pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesetaraan kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Selain itu, ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah menurut (Suparmoko, 2002:19). Pertama adalah sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing masyarakat, Kedua adalah pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri, Ketiga adalah dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang akan dilakukan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999 ; Blakely E. J, 1989).

Ketimpangan wilayah (regioonal disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Di samping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Mudrajat Kuncoro, 2004). Dalam arti jika PDRB per kapita antar kecamatan lebih rendah atau merata belum tentu tingkat ketimpangan pembangunannya lebih kecil maupun sebaliknya.

Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Ibukota Kota Ternate adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999 ; Blakely E. J, 989).

Ketimpangan wilayah (regioonal disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerahdaerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecendrungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Di samping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Mudrajat Kuncoro, 2004). Dalam arti jika PDRB per kapita antar kecamatan lebih rendah atau merata belum tentu tingkat ketimpangan pembangunannya lebih kecil maupun sebaliknya.

Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Ibukota Kota Ternate adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yakni Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat.

Tiga kecamatan lainnya berada di luar Pulau Ternate, sehingga jaraknya dengan Ibukota Kota Ternate cukup jauh. Kecamatan terjauh jaraknya Kecamatan Pulau Batang Dua yang berjarak 121,6 km dari pusat kota. Posisinya berada di Pulau Mayau dan Tifure, yang terletak di tengah perairan Laut Maluku.

Kota Ternate sebelumnya merupakan Kota Administratif yang berada di bawah binaan Daerah Maluku Utara. Kemudian, melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara Kota Ternate dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat status menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate.

Pelaksanaan otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 yang mana wewenang pengelolaan sistem pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan otonomi daerah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

Kota Ternate merupakan daerah otonom yang berada di wilayah provinsi Maluku Utara. Pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada sektor jasa dan industri. Menurut Rostow bahwa untuk menuju tahap tinggal landas paling tidak di butuhkan penambahan investasi antara 5 sampai 10 persen terhadap produk domestik regional bruto. Konsentrasi ekonomi yang bertumpu pada wilayah tertentu, di khawatirkan akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Kinerja perekonomian Kota Ternate pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yang mencapai 7,87 triliun rupiah dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 7,08 triliun rupiah.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui bahwa perekonomian Ternate pada tahun 2016 tumbuh sebesar 8,02 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lebih lambat dimana laju pertumbuhan pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,10 persen. Hal ini tak lepas dari pengaruh berbagai faktor yang terjadi di dalam maupun luar wilayah Ternate yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas produksi baik barang dan jasa di Kota Ternate. Pada tahun 2016, perekonomian Kota Ternate didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; transportasi dan pergudangan. Kontribusi dari ketiga sektor ini mencapai 58,28 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi masing-masing sebesar 25,93 persen; 16,45 persen, serta 16,30 persen. Secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Ternate selama kurun waktu

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

Kota ternate merupakan daerah otonom yang berada di wilayah provinsi maluku utara. Pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada sektor jasa dan industri. Menurut Rostow bahwa untuk menuju tahap tinggal landas paling tidak di butuhkan penambahan investasi antara 5 sampai 10 persen terhadap produk domestik regional bruto. Konsentrasi ekonomi yang bertumpuh pada wilayah tertentu, di khawatirkan akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

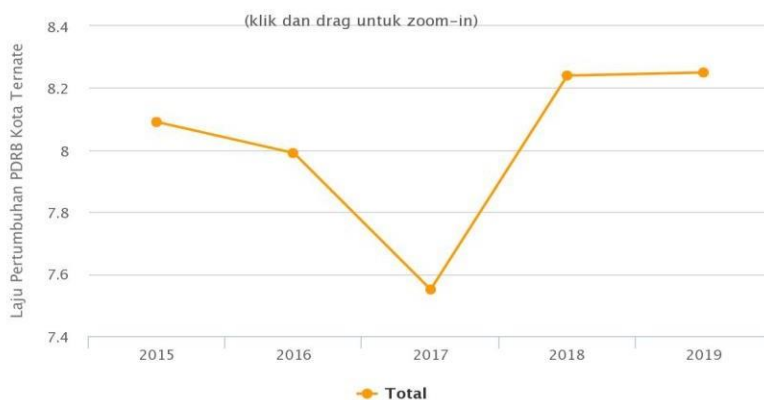
Kinerja perekonomian Kota Ternate pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yang mencapai 7,87 triliun rupiah dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 7,08 triliun rupiah.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui bahwa perekonomian Ternate pada tahun 2016 tumbuh sebesar 8,02 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lebih lambat dimana laju pertumbuhan pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,10 persen. Hal ini tak lepas dari pengaruh berbagai faktor yang terjadi di dalam maupun luar wilayah Ternate yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas produksi baik barang dan jasa di Kota Ternate. Pada tahun 2016, perekonomian Kota Ternate didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; transportasi dan pergudangan. Kontribusi dari ketiga sektor ini mencapai 58,28 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi masing-masing sebesar 25,93 persen; 16,45 persen, serta 16,30 persen. Secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Ternate selama kurun waktu 2010-2016 tidak mengalami perubahan dan masih didominasi oleh ketiga sektor dalamkelompok tersier tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate pada Lima Tahun Terakhir



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenang yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincolin Arsyad, 1999).

I. Rumusan Masalah

- a. Berdasarkan lataran belakang dan kajian wilayah, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut;
- b. Bagaimana tingkat pendapatan perkapita antar wilayah kecamatan di kota Ternate?
- c. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di kota Ternate?

II. Tujuan

- a. Untuk mengetahui tingkat pendapatan perkapita antar wilayah kecamatan di kota Ternate.
- b. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah kecamatan di kota Ternate.

II. KARANGKA TEORITIK

i. Landasan Teori

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat, 2013:1). Pembangunan ekonomi adalah suaturangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011:9). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dikutip dalam Kuncoro, 2006:5). Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012:338), salah satu faktor utamadalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta. Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012:338).

b. Pembangunan Daerah

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Telah membawa perubahan dalam sistem pembangunan, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Berdasarkan Sjafrizal (2014:14), perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar proses pembangunan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dialami. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (Arsyad, 1999:108). Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain sebagai bentuk andil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

pembangunan yang dilakukan daerah dapat berupa kemakmuran wilayah, kemakmuran masyarakatnya maupun kedua-duanya. Seperti yang dijelaskan dalam Sjafrizal (2012), pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (*place prosperity*), ditujukan agar kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dll. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat mendorong pesat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal tersebut disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

C. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Aspek ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan, karena masalah utama pada negara-negara sedang berkembang adalah pengangguran (*unemployment*) dan kemiskinan (*poverty*) yang merupakan pertanda umum dari keterbelakangan ekonomi. Seperti proses pembangunan pada tingkatan nasional maupun daerah di Indonesia yang masih memandang bahwa pertumbuhan ekonomi masih merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Hingga sampai saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun daerah disamping pembangunan fisik dan sosial.

Pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah lebih banyak bersifat lintassektoral dengan memanfaatkan unsur tata ruang dan keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014:13). Adanya ketidaksetaraan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi, membuat pemanfaatan unsur tata ruang dan keuntungan lokasi di masing-masing daerah tidaklah menghasilkan pertumbuhan yang sama. Sedangkan kemampuan daerah untuk tumbuh dibutuhkan berbagai unsur yang saling terkait dan mempengaruhi. Berikut adalah beberapa sumber penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud (Sadono Sukirno, 2009), yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah tinggi.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Apabila barang-barang modal saja bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu pendapatan perkapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil. Kemajuan ekonomi yang berlaku diberbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

d. Ketimpangan Wilayah

Menurut wahyudi (2004) dalam kehidupan ekonomi, ketimpangan terus membengkak, baik dalam negara (within states) maupun antar negara (between states). Seperti yang ditunjukkan oleh laporan UNDP tahun 1999, ketimpangan dosmetik telah meningkat di banyak negara seperti Cina, negara-negara Eropa Timur dan juga Negara Persemakmuran Merdeka dan juga negara-negara industry maju. seperti Swedia, Inggris dan Amerika Serikat, sementara kesimpangan antar negara juga meningkat di waktu ke waktu.

e. Ukuran Ketimpangan Pembangunan

Untuk mengukur adanya disparitas atau ketimpangan, perlu dibedakan terlebih dahulu antara mengukur ketimpangan dalam pembagian atau distribusi pendapatan dengan mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan digunakan alat ukur seperti Gini Ratio, Kurva Lorenz dan alat ukur berdasarkan kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah digunakan alat ukur seperti Williamson Index dan Theil Index.

1. Gini Rasio

Gini Rasio atau Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan. Nilai koefisien Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi (BPS:2013). Adapun kriteria pengukurannya sebagai berikut:

- a) Ketimpangan taraf rendah, apabila koefisien Gini $< 0,35$
- b) Ketimpangan taraf sedang, bila koefisien Gini antara $0,35 - 0,5$
- c) Ketimpangan taraf tinggi, bila koefisien Gini $> 0,5$
- d) Sedangkan untuk mengitung besarnya koefisien Gini digunakan perhitungansebagai berikut:

$$G = \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$$

Dimana:

P_i = Presentase rumahtangga atau penduduk pada wilayah i

Q_i = Presentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran wilayah

Index Williamson

Index ini yang sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim untuk mengukur perbedaan. Indeks ini memiliki beberapa kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Dan untuk formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 / n}}{\bar{y}}$$

Dimana:

Untuk kabupaten/kota

Y_i = PDRB perkapita di kecamatan i

\bar{y} = PDRB perkapita rata-rata kabupaten/kota
= Jumlah penduduk kecamatan i

n = jumlah penduduk di kabupaten/kota Untuk provinsi:

Y_i = PDRB perkapita di kabupaten/kota i
 \bar{Y} = PDRB perkapita rata-rata provinsi

F_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i
 N = jumlah penduduk diprovinsi

III. METODE PENELITIAN

i. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota ternate yang meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan ternate utara, ternate tengah, ternate selatan, pulau ternate, ternate barat, pulau moti, batang dua, dan pulau hiri.

ii. Jenis dan Sumber Data

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga/instansi yang terkait yang mempublikasikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan antara lain : data PDRB kota ternate, data penduduk, data yang bekerja menurut lapangan usaha per kecamatan, data lainnya yang di butuhkan dalam penelitian ini.

iii. Teknik Pengumpulan Data

Penumpulan data dilakukan dengan menghubungi lembaga/instansi terkait yang mempublikasikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) atau dengan mengunjungi laman – laman resmi situs lembaga /badan yang menyediakan data online melalui internet. Setelah memperoleh data selanjutnya dilakukan verifikasi, dikompilasi sesuai dengan variable yang dianalisis.

iv. Model Analisis

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. analisis terkait dengan tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kesejatraan antar kecamatan di kota ternate ang tercermin dari PDRB perkpita kecamatan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan defivasi terhadap PDRB kota ternate menjadi PDRB pada setiap kecamatan. Dalam menghitung PDRB pada setiap kecamatan dibutuhkan data penduduk menurut lapangan usaha. Penggunaan indicator ini mengasumsikan bahwa proporsi PDRB pada setiap kecamatan sebanding dengan presentase penggunaan penduduk yang bekerja pada setiap lapangan usaha di kecamatan.

$$PDRB_{\text{sector I kec}} = PDRB_{\text{ sektor I kota}} \times \% \text{penduduk bekerja sektor I kec}$$

- b. Jumlahkan PDRB lapangan usaha di kecamatan, maka akan di peroleh PDRBkecamatan. PDRB perkapita kecamatan diperoleh dengan formulasi.

$$PDRB_{per\ kapita} = \frac{PDRB\ kecamatan}{jumlah\ penduduk\ kecamatan}$$

- c. Setelah diperoleh perhitungan data PDRB kecamatan, maka analisis terhadap tingkat ketimpangan antar wilayah di kecamatan di kota ternate dapat di hitung dengan menggunakan formulasi indeks wiliamson, sebagai berikut ;

$$Indeks\ wiliamson = x = \frac{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}{Y}$$

Ket : Y_i = PDRB perkapita kecamatan i

Y = PDRB Perkapita rata-rata seluruh kecamatan
 f_i = Penduduk Kecamatan i

n = Jumlah seluruh kab/Kota.

V. HASIL DAN PEMBAHASAAN

i. Pendapatan Perkapita Kecamatan Di Kota Ternate

Dari hasil perhitungan menggunakan alat analisis Ms Excel dengan indikator jumlah penduduk perkecamatan dan PDRB perkecamatan, maka mendapatkan nilai pendapatan perkapita sebagai berikut;

Tabel 1. Pendapatan Perkapita Kecamatan di Kota Ternate 2010-2019 (Rp)

Wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pulau Ternate	13,19053108	12,92581	12,67004	25,03932	24,8965634
Moti	24,7856542	24,32969	23,88551	22,51532	23,42564045
Pulau Batang Dua	24,98581657	24,54155	24,12123	22,58947	22,31915439
Pulau Hiri	24,75424014	24,27881	23,82878	22,58023	23,40234242
Ternate Selatan	24,58083141	24,00546	23,4506	22,99956	22,97344592
Ternate Tengah	24,30160788	23,70152	23,12343	22,91555	24,6051332
Ternate Utara	24,43422617	23,88133	23,34734	22,75511	24,47083808
Ternate Barat				24,7308	25,20925473
Kota Ternate	161,0329075	157,6642	154,4269	186,1254	191,3023726
Rata-rata	23,00470107	22,52345242	23,62614562	23,26566987	23,91279657

Sumber, data diolah

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari segi ekonomi tingkat

kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat diukur dari tingkat pendapatan perkapitanya. Banyaknya nilai barang dan jasa yang dihasilkan di tahun tertentu pada suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk akan menggambarkan nilai dari pendapatan perkapita. Oleh karena itu, supaya kesejahteraan penduduk terus mengalami peningkatan, maka penambahan nilai barang dan jasa yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus diupayakan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya. Penduduk merupakan faktor produksi, terutama bagi penduduk berada pada usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kota Ternate

wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pulau Ternate	16553	16892	17233	8720	8770
Moti	4909	5001	5094	5404	5194
Pulau Batang Dua	2762	2812	2861	3055	3092
Pulau Hiri	3064	3124	3183	3359	3241
Ternate Selatan	73263	75019	76794	78300	78389
Ternate Tengah	60312	61839	63385	63960	59568
Ternate Utara	52134	53341	54561	55981	52056
Ternate Barat				9326	9149
Kota Ternate	212997	218028	223111	228105	219459

BPS; Kota Ternate

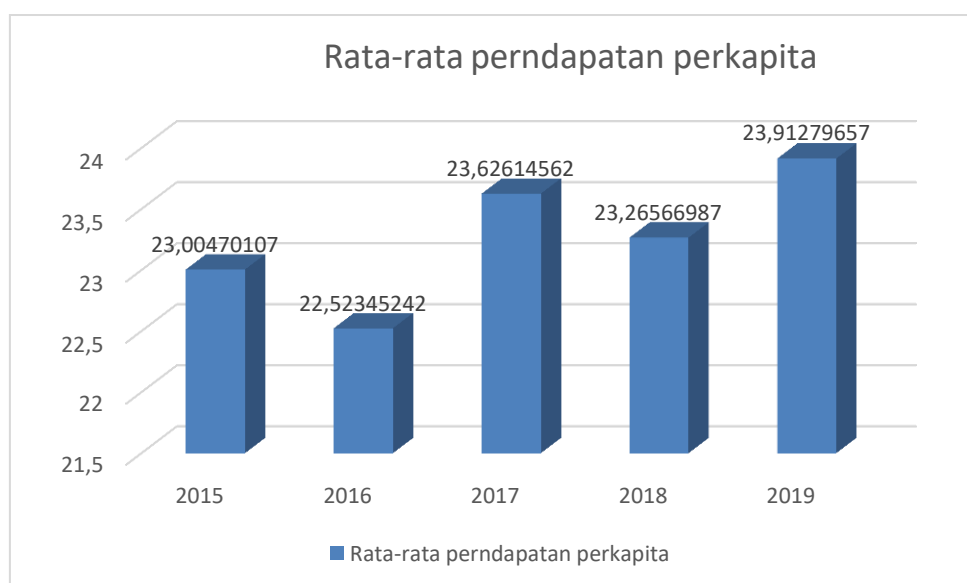
Penggunaan indikator ini mengasumsikan bahwa proporsi PDRB pada setiap kecamatan sebanding dengan persentase penggunaan jumlah penduduk per- kecamatan. Data yang digunakan disini merupakan data sensus penduduk kota ternate tahun 2010-2019. Kemudian jumlah kecamatan diasumsikan masih 7 (tujuh) kecamatan sebelum pemekaran ternate pulau dan ternate barat, yaitu ternate utara, ternate tengah, ternate selatan, pulau ternate, moti, batang dua dan pulau hiri. Dan pada tahun 2018 terjadi pemekaran pulau ternate menjadi ternate barat dan pulau ternate, menjadi 8 (delapan) kecamatan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 wilayah dengan jumlah PDRB perkapita kecamatan tertinggi di Pulau Batang Dua yaitu Rp24.98582 dengan jumlah penduduk sebanyak 2762 orang. Sedangkan wilayah dengan nilai PDRB perkapita terendah adalah Kecamatan pulau ternate yaitu Rp13.19053 dengan jumlah

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

penduduk sebanyak 16553. Walaupun PDRB Kecamatan Pulau Ternate relatif lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan Batang Dua, namun dengan jumlah penduduk yang lebih rendah menjadikan pendapatan perkapita penduduk diwilayah Kecamatan Batang Dua relatif lebih tinggi. Sementara distribusi pendapatan perkapita kecamatan lainya cenderung merata, sebanding dengan penggunaan jumlah penduduk.

Grafik 1. Pendapatan Perkapita perkecamatan di kota ternate tahun 2015-2019 (Rp)



Sumber; Data Diolah

Sebagian besar penduduk kota Ternate bekerja pada lapangan usaha jasa, perdagangan, dan pertanian. Kecamatan Ternate Tengah merupakan wilayah penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate. Kontribusi Kecamatan Ternate tengah mencapai Rp. 2044205.482. Sedangkan kontribusi PDRB kecamatan lain di kota ternate terbilang rendah. Yang di pengaruhi jumlah penduduk setiap kecamatan.

Pendapatan perkapita kota ternate tahun 2015-2016 mengalami penurunan, dilihat dari rata-rata tiap tahun. Di tahun 2017 hingga 2019 dalam kategori merata, sebanding dengan jumlah penduduk dan kontribusi PDRB perkecamatan.

Nilai PDRB yang besar tidak selalu mencerminkan bahwa kemakmuran penduduknya selalu lebih baik dari wilayah lainnya. Tingkat kemakmuran umumnya diukur dengan pendapatan perkapita yang menunjukkan ratio antara PDRB dengan jumlah penduduk.

ii. Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson Kota kota Ternate Tahun 2015- 2019 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kota Ternate mengalami penurunan.

Tabel 3. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kecamatan Di Kota Ternate Tahun 2015-2019

TAHUN	NILAI INDEKS WILLIAMSON
2015	0.03787
2016	0.03519855
2017	0.02040346
2018	0.00813535
2019	0.01035743

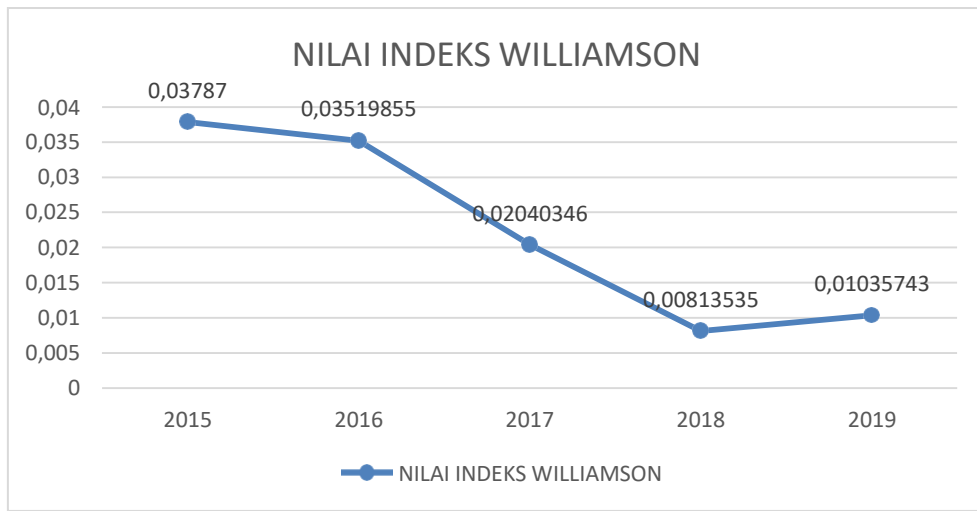
Sumber, data diolah

Pada tahun 2015 dengan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kota Ternate yang tercermin dalam Indeks Williamson sebesar, 0.03787. Pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan 0.03519855. hingga tahun 2018 sebesar 0.00813535. Namun demikian pada tahun 2019 trendnya cenderung mengalami peningkatan sebesar 0.01035743.

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAHKECAMATAN DI KOTA TERNATE

Meskipun ketimpangan pembangunan kota ternate di tahun 2019 terjadi kenaikan, namun tingkat ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Ternate relatifrenda atau dapat di sebut tidak terjadi ketimpangan yang signifikan, karena rata-rata ketimpangan yang terjadi sebesar 0,0105 masih di bawah 0,5.

Grafik 2. Ketimpangan pembangunan menurut perhitungan indeks williamson 2015- 2019



Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah tertentu, sehingga yang menikmati hasilnya hanya sebagian, serta adanya perbedaan sumber daya yang di miliki antar kecamatan sehingga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar daerah.

Infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan harus lebih di utamakan dan ditingkatkan karena ini merupakan faktor yang sangat menunjang agar sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelolah sumber daya alam dengan baik. Agar memiliki nilai tambah yang tinggi demi kemajuan daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur ini harus harus merata di setiap daerah agar ketimpangan antar daerah berkurang atau tidak ada lagi.

V. PENUTUP

i. Kesimpulan

- a. Pendapatan perkapita kota tahun 2015-2016, mengalami penurunan. dengan rata-rata pendapatan perkaipita sebesar 24.98582 juta pada tahun 2015 dan terendah kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp. 13.19053 dengan rata-rata pendapatan Perkapita sebesar Rp. 23.00470107. Tahun 2017 hingga 2019 pendapatan perkapita cenderung merata sebanding dengan penggunaan jumlah penduduk dan distribusi PDRB perkecamatan.
- b. Tingkat ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Ternate dalam kategori rendah, bahkan menurun pada tahun 2015 hingga 2018. Dan mengalami kenaikan di tahun 2019. Namun Demikina Tingkat ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Ternate tergolong rendah karena rata-rata dibawah 0.05.

ii. Saran

- a. Dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka produktivitas wilayah harus terus ditingkatkan dengan tetap menekan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat yang seimbang sesuai dengan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.
- b. Trend ketimpangan yang cenderung menurun harus dipertahankan dan di imbangi pemerataan sarana pendukung. walaupun kenaikan di tahun 2019 tidak signifikan, harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Kota Ternate. Sehingga tidak menjadi disparitas pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L incolin. 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Dan PembangunanEkonomi Daerah.
BPFE. Yogyakarta
- Arsad Lincolin, Ekonomi Pembangunan, STIEYKPN Yogyakarta, Yogyakarta 1999
- Blakely, E.J.1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*.
California; SAGE Publicasion, IncBPS,
kota ternate dalam angka, tahun2019
- Dumary. 1996. Perekonomian Indonesia, Jakarta: 1996
- Faktiatum Nadirah, *Artikel*, ketimpangan antar wilayah, Banten 2012
- Dr. Muammil Sun'an. SE. MP. M.AP, *Ekonomi Pembangunan*, Mitra Wacana Madia Ghozali, Imam,
2009, *Ekonometrika Teori, KOnsep, dan Aplikasi dengan SPSS*
Universitas Diponegoro : Semarang
- Hendro Ekwarso, Taryono, Isyandi, *Jurnal, Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
Kecamatan Di Kota Dumai*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Jan-Erik Lane & Svante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif DEMOKRATISASI &PERTUMBUHAN
Benarkah Kontradiktif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Jhingan, M, L, 2002. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
Katalog BPS : 9201001.8271 indikator ekonomi tahun 2019
- Kuncoro, *Kesenjangan Antar Wilayah Wilayah*, Erlangga, Jakarta, 2003 Kuncoro, Mudrajad.
2003. Metode Riset Untuk & Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, PerencanaStrategi dan
Peluang. Jakarta: Erlangga
- Muh Hamid, Siradjuddin, Bahrul Ulum Rusydi, *Jurnal, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat*
- Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, EdisiRevisi, Bumi Aksara
Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, 2015 Sfafrizal, *Ketimpangan
pembangunan Antar Wilayah*, Niaga Swadaya Jakarta, 2003
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, untuk keuangan dan pembangunan daerah*.
Andi. Yogyakarta
- Sadono Sukirno. 2008. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada

Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah.

Andi. Yogyakarta

Todaro, *Ekonomi pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahDa